

# LAPORAN KINERJA

## INSTANSI PEMERINTAH

# LKJIP

---


## TAHUN 2023



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BerAKHLAK**  **# bangga  
melayani  
bangsa**

### CONTACT US

 0765-440476

 [bapenda@dumaikota.go.id](mailto:bapenda@dumaikota.go.id)

 [bapenda.dumaikota.go.id](http://bapenda.dumaikota.go.id)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	7
BAB I PENDAHULUAN .....	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	16
1.3 Maksud dan Tujuan.....	18
1.4 Isu Strategis.....	19
1.5 Cascading Kinerja.....	19
1.6 Peta Proses Bisnis .....	21
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	25
2.1 Rencana Strategis .....	25
2.2 Tujuan Dan Sasaran .....	26
2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program.....	28
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 .....	34
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023 .....	37
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA.....	38
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional .....	39
3.5 Akuntabilitas Keuangan .....	40
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	41
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	41
3.8 Prestasi dan Penghargaan.....	42
BAB IV PENUTUP .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan BAPENDA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	10
Tabel 2 .....	11
Tabel 3 .....	11
Tabel 4 .....	12
Tabel 5 .....	13
Tabel 6 .....	13
Tabel 7 .....	22
Tabel 8 .....	23
Tabel 9 .....	27
Tabel 10 .....	28
Tabel 11 .....	29
Tabel 12 .....	30
Tabel 13 .....	30
Tabel 14 .....	31
Tabel 15 .....	33
Tabel 16 .....	34
Tabel 17 .....	35
Tabel 18 .....	37
Tabel 19 .....	38
Tabel 20 .....	39
Tabel 21 .....	40
Tabel 22 .....	41
Tabel 23 .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	18
Gambar 2 .....	20
Gambar 3 .....	21
Gambar 4 .....	26
Gambar 5 .....	42

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

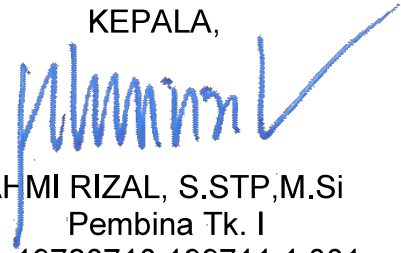
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Keuangan Khususnya Pendapatan Daerah Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 10 Januari 2024

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP,M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19780710 199711 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan khususnya membantu dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

Sebagaimana Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai maka sebagai unsur teknis, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 4 (Empat) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas tata kelola Kepemerintahan Daerah yang baik “ dan Tujuan Strategis Perangkat Daerah yaitu “ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu “Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah”.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan serta 1 (Satu) Sasaran dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

## **Program**

### **1. Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**

#### **Kegiatan**

##### **1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **Kegiatan**

##### **1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

#### **Kegiatan**

##### **1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

#### **Kegiatan**

##### **1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.4.1 Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
- 1.4.2 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 1.4.3 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

## **Kegiatan**

### **1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.5.3 Penyediaan bahan logistik kantor
- 1.5.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.5.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- 1.5.6 Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

## **Kegiatan**

### **1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.6.1 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 1.6.2 Pengadaan Mebel
- 1.6.3 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 1.6.4 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

## **Kegiatan**

### **1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.7.1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 1.7.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.7.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.7.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

## **Kegiatan**

### **1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **Sub Kegiatan**

- 1.8.1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 1.8.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 1.8.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.8.4 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

## **Program**

### **2. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

#### **Kegiatan**

##### **2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

###### **Sub Kegiatan**

- 2.1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- 2.1.2 Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
- 2.1.3 Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- 2.1.4 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- 2.1.5 Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- 2.1.6 Pengolahan , pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
- 2.1.7 Penilaian Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ( PBBP2 ) serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB )
- 2.1.8 Penetapan wajib pajak daerah
- 2.1.9 Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- 2.1.10 Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- 2.1.11 Penagihan pajak daerah
- 2.1.12 Penyelesaian keberatan pajka daerah
- 2.1.13 Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- 2.1.14 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami dua kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	52 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 28.657.827.008 (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

**Tabel 2**  
**Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 25.029.144.486	Dana Transfer Umum - DBH
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.628.682.522	Dana Transfer Umum - DBH
J U M L A H		Rp. 28.657.827.008	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 31.916.278.276	Dana Transfer Umum - DBH
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.132.856.912	Dana Transfer Umum - DBH
J U M L A H		Rp. 39.049.135.188	

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4**  
**Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Tercapainya penerimaan Pajak Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ( PAD )	52 %	63,41 %	121,94 %	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 39.049.135.188 (Tiga puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 36.044.266.824 (Tiga puluh enam milyar empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 3.004.868.364 (Tiga milyar empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

1. Belanja Operasi	: Rp. 36.044.266.824
2. Belanja Modal	: Rp. 3.004.868.364
J u m l a h	: Rp. 39.049.135.188

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Tahun 2023**

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	Persentase PAD terhadap Pendapatan	31 %	30,59 %	98,68 %	39.049.135.188	35.981.045.374	92,14%
Sasaran : Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52 %	63,41 %	121,94 %			
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan Daerah Kota	100 %	100 %	100 %	7.132.856.912	6.619.705.403	92,88 %
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan	100 %	100 %	100 %	31.916.278.276	29.377.209.971	91,99%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Efisiensi penggunaan Sumber Daya**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA ( % )	PENYERAPAN ANGGARAN ( % )	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	Persentase PAD terhadap pendapatan	98,68 %	92,14 %	107,29 %	EFISIEN

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pada Indikator Kinerja Utama Persentase PAD terhadap Pendapatan persentase capaian kinerja tahun 2023 (98,68%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92,14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumaisebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan daerah Kota Dumai

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab ( responsibilitas ) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Keuangan Khususnya Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain :

- a. Perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;

- c. Penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- e. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
- g. Penyusunan rencana pendapatan daerah;
- h. Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;
- i. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pendapatan daerah;
- j. Pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi
  - 1. Subbagian tata Usaha
  - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan
  - 2. Subbidang Penetapan dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari
  - 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan
  - 2. Subbidang Penagihan dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  - 2. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan



#### **1.4 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan unsur Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang perlu ditangani sebagai berikut :

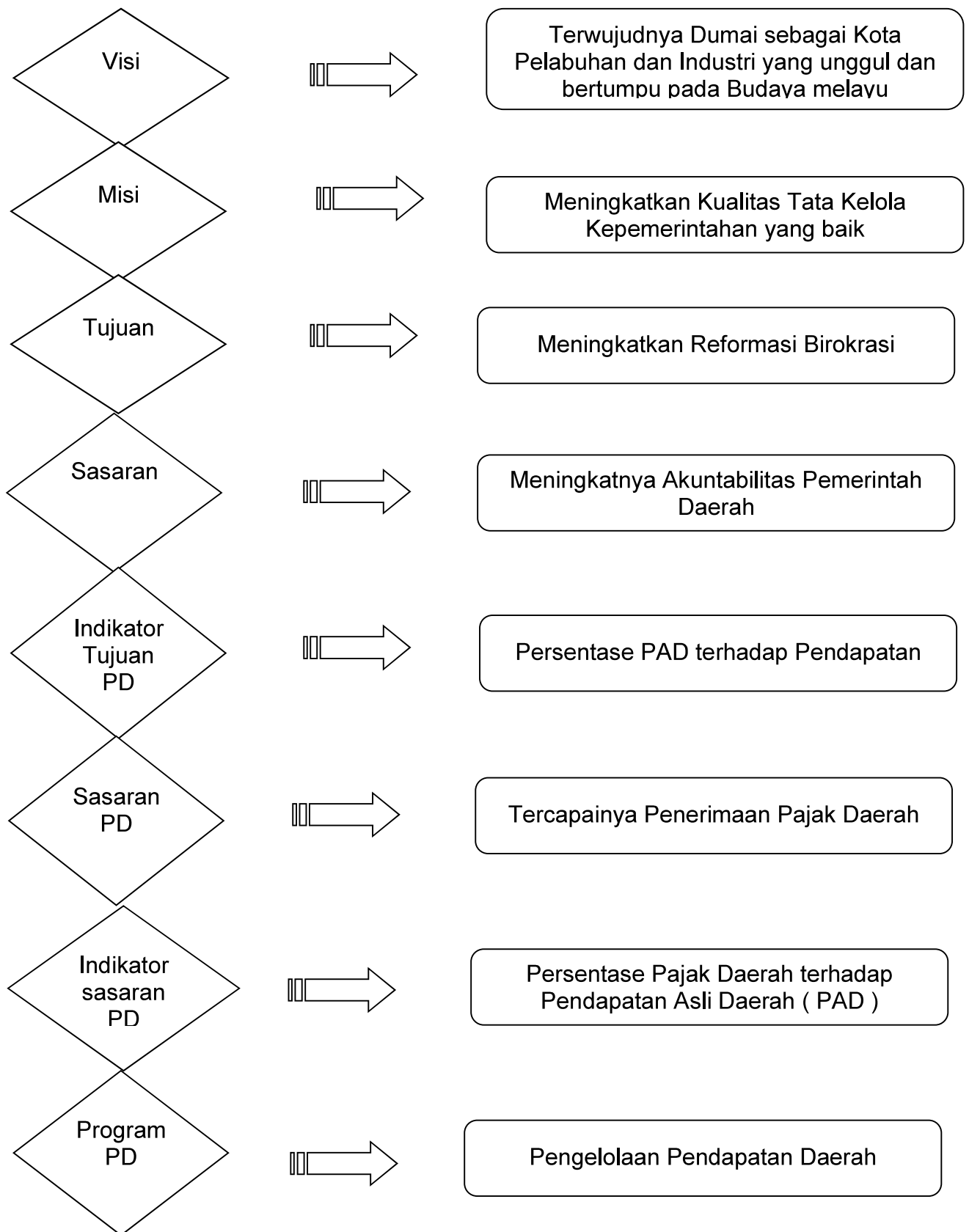
1. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyusunan produk hukum daerah
2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten
3. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang pajak daerah
4. Peningkatan sosialisasi kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah
5. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah berbasis IT
6. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta pengembangan pengelolaan pajak daerah

#### **1.5 Cascading Kinerja**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



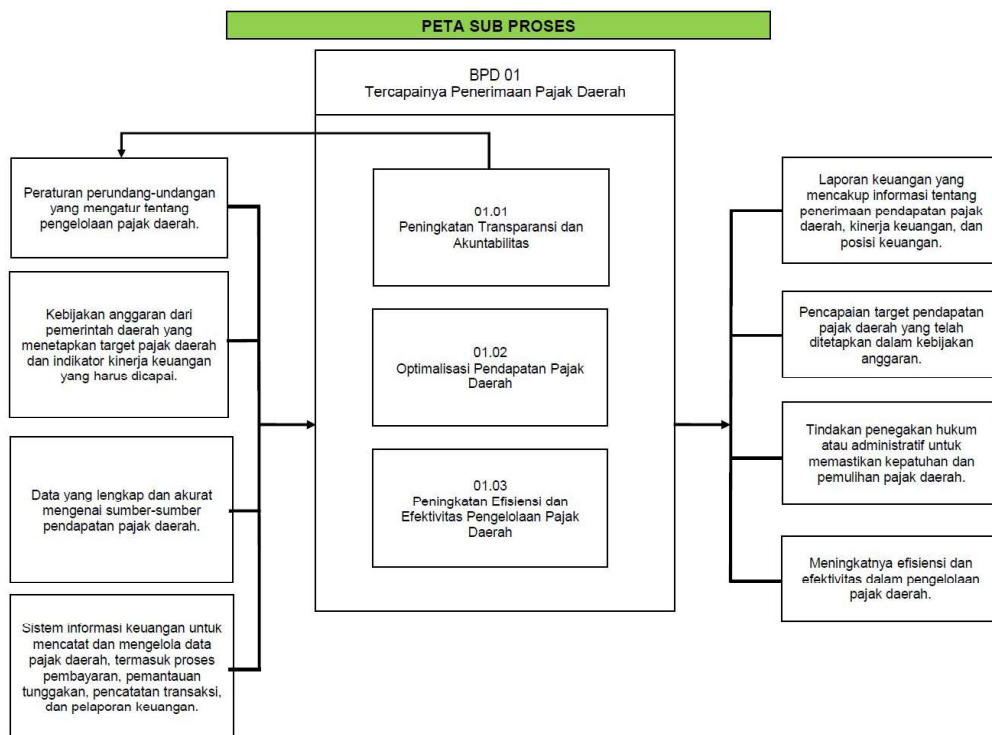
**Gambar 2**  
**Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**



## 1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana skema berikut :

**Gambar 3**  
**Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**



## 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1324.1/INSP-S Tanggal 8 Desember 2023, Halaman 3 (tiga), telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain :

**Tabel 7**  
**Kelemahan serta Rekomendasi**

No	Kelemahan/Kekurangan	Saran/Rekomendasi
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai belum membuat Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) mulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada.	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai agar menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang yang dimulai dari Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada.
2.	Pimpinan/Atasan belum sepenuhnya terlibat langsung sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja dan belum melakukan pemantauan atas hasil kerja/kinerja bawahannya.	Pimpinan/atasan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai perlu melakukan evaluasi terhadap pengukuran capaian kinerjanya, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kepada bawahan secara berkala (setiap bulan) pada aplikasi e-Kinerja BKN.
3.	Belum semua ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja.	Seluruh ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai agar melaporkan aktivitasnya terhadap hasil pengukuran kinerja secara berkala (setiap bulan) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi e-Kinerja BKN).
4.	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai agar melengkapi Lembar Penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan.

5.	Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, karena penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama oleh ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.	Informasi yang disajikan pada laporan kinerja agar menjadi bahan perhatian utama dan bahan evaluasi bagi setiap jajaran ASN yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai guna penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah berikutnya.
----	--	--

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Langkah-Langkah Tindak Lanjut**

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang yang dimulai dari Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada.	Januari 2024
2.	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan melakukan evaluasi terhadap pengukuran capaian kinerjanya, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kepada bawahan secara berkala (setiap bulan) pada aplikasi e-Kinerja BKN	Januari-Desember 2024

3.	Seluruh ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan melaporkan aktivitasnya terhadap hasil pengukuran kinerja secara berkala (setiap bulan) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi e-Kinerja BKN)	Januari-Desember 2024
4.	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan melengkapi Lembar Penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja dalam pemberian / pengurangan tunjangan kinerja / penghasilan.	Januari-Desember 2024
5.	Informasi yang disajikan pada laporan kinerja akan menjadi bahan perhatian utama dan bahan evaluasi bagi setiap jajaran ASN yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai guna penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah berikutnya.	Januari-Desember 2024

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

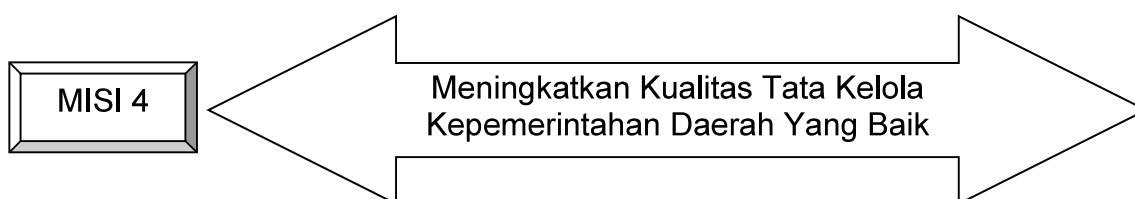
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Dumai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai :

**Gambar 4**



## **2.2 Tujuan Dan Sasaran**

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari Tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**  
**Tahun 2023**

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik



Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	31 %	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	52 %

### 2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**  
**Tahun 2023**

Visi :					
Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
MISI ke 4 :					
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	1	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
				2	Meningkatkan Pengawasan Internal dan Eksternal
				3	Meningkatkan Partisipasi Publik dan Pengawasan Masyarakat
		2	Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah	1	Pemetaan Potensi dan Peningkatan Basis Pajak Daerah
				2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

		3	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah	1	Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi
				2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 12**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	52 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 39.049.135.188 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

**Tabel 13**  
**Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 25.029.144.486	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.628.682.522	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 28.657.827.008</b>	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31.916.278.276	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 7.132.856.912	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 39.049.135.188</b>	

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel 15**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : 
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : 
$$capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

**Tabel 16**  
**Atribut Capaian Indikator Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengankurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

### **3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah menetapkan satu Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan satu Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam Tabel 17 dan dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023**

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	48.78 %	95.64 %	52	63.41 %	121.93 %	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 52% realisasi sebesar 63,41% tercapai 121,93 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 48,78% atau tercapai sebesar 95,64 %, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 27,46%
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
  - Kepemimpinan yang mampu memotivasi dan menginspirasi tim kerja serta memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab;
  - Program insentif dan relaksasi pajak daerah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak berupa potongan pajak atau insentif lainnya;
  - Dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pajak daerah serta pengenalan kepada teknologi terkini yang digunakan dalam administrasi perpajakan;
  - Masifnya kegiatan-kegiatan lapangan seperti sosialisasi, penagihan tunggakan dan pelayanan pembayaran di beberapa kelurahan di Dumai membangkitkan antisiasme masyarakat untuk membayar pajak daerah;



- Kerja sama yang baik antara Bapenda dengan instansi terkait, sehingga membuahkan hasil positif salah satunya pertukaran data/informasi perpajakan sehingga potensi PAD dari beberapa sektor dapat digali dengan maksimal.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut :
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan kewajiban perpajakan lainnya;
  - Kurangnya SDM yang terlatih dan berpengalaman serta kurangnya keahlian dalam bidang perpajakan serta keterbatasan kemampuan analisis dalam mengoptimalkan pendapatan;
  - Sistem informasi yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data pendapatan daerah.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut :
- Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang telah mendukung kesuksesan capaian tersebut;
  - Mengidentifikasi kebijakan, strategi, atau praktik terbaik yang telah berkontribusi pada peningkatan persentase pajak daerah;
  - Mengidentifikasi peluang untuk memperluas basis pajak dengan memasukkan sektor-sektor baru atau mengoptimalkan pengenaan pajak pada sektor yang sudah ada;
  - Terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya terhadap pembangunan daerah;
  - Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan PAD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas;
  - Meninjau regulasi pajak untuk memastikan bahwa kebijakan pajak mendukung pertumbuhan ekonomi dan berkeadilan.

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	51%	52%	48.78%	63.41%	95.64%	121.93%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator dimaksud adalah Persentase Pajak Daerah terhadap PAD dengan target pada tahun 2022 adalah 51 % terealisasi 48,78 % berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2022 adalah 95,64 % berasal dari perhitungan realisasi dibagi dengan target. Capaian Tahun 2022 tidak terealisasi 100 % hal ini disebabkan oleh peningkatan salah satu komponen PAD yaitu Lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2022 sebesar 112,97% sehingga mempengaruhi rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah (PAD) yang terdiri dari 4 komponen yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 52 % dan terealisasi 63,41 % berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2023 adalah 121,93 %.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) Tahun 2023 dapat dikatakan **SANGAT BERHASIL**.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 19**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	54 %	63,41 %	280,27%

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mempercepat capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Upaya untuk mempercepat capaian Indikator Persentase pajak daerah terhadap PAD sebagai berikut :

1. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak :
  - a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan daerah.
  - b. Menerapkan program edukasi yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat pembayaran pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
2. Optimalisasi Sistem Informasi Perpajakan :
  - a. Memperbarui dan meningkatkan sistem informasi perpajakan untuk memastikan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan dan pemrosesan data.
  - b. Menggunakan teknologi untuk mempermudah pendaftaran pajak, pembayaran, dan pelaporan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM :
  - a. Memberikan pelatihan kepada ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan dan kemampuan teknis yang diperlukan.

- b. Membangun tim yang efektif dan berkompeten untuk menangani masalah perpajakan dengan cepat dan akurat.
4. Pengoptimalan Prosedur Perpajakan :
  - a. Meninjau dan memperbarui prosedur perpajakan untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut efisien dan tidak memberatkan wajib pajak.
  - b. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan administratif yang mungkin menghambat pembayaran pajak.
5. Kerjasama dengan Pihak Eksternal:
  - a. Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
  - b. Melibatkan pihak eksternal dalam sosialisasi dan edukasi pajak dan inisiatif lainnya.
6. Penggunaan Teknologi Canggih :
  - a. Mengimplementasikan teknologi canggih seperti big data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data pajak dengan lebih efektif.
  - b. Menerapkan sistem manajemen informasi terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data dan pelaporan.
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas :
  - a. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat.
  - b. Menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci tentang penggunaan PAD.

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional sebagaimana Tabel 20 berikut :

**Tabel 20**  
**Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	104,2%	102,8%	Realisasi Nasional merupakan Realisasi Pajak Pusat

*Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan 2023 (unAudited) dan Laman Website Kemenkeu Tahun 2023*

### 3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 39.049.135.188 (Tiga puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 36.044.266.824 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 3.004.868.364 (Tiga Milyar Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 35.981.045.374 (Tiga Puluh Lima milyar Sembilan ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 33.290.589.274 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 2.690.456.100 (Dua milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 21**  
**Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.132.856.912	6.619.705.403	92.88	6.876.281.158

Total anggaran belanja adalah Rp 7.132.856.912 dengan realisasi Rp 6.619.705.403 atau dengan capaian sebesar 92.88 % dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan adanya selisih standar harga barang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan harga barang sesungguhnya di lapangan serta terdapat sisa penganggaran perjalanan dinas dari komponen transportasi dan akomodasi.

### 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 22**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	Persentase PAD terhadap Pendapatan	31 %	30,59 %	98,68 %	39.049.135.188	35.981.045.374	92,14%
Sasaran : Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52 %	63,41 %	121,94 %			
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan Daerah Kota	100 %	100 %	100 %	7.132.856.912	6.619.705.403	92,88 %
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan	100 %	100 %	100 %	31.916.278.276	29.377.209.971	91,99%

### 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan tingkat efisiensinya adalah 108,7% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 ( 91,99%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
- b. Pada Indikator Persentase pencapaian target pendapatan Daerah Kota tingkat efisiensinya adalah 107,6 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja

Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 ( 92,88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.

### 3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 23**  
**Prestasi dan Penghargaan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Pelaksanaan PKS-tripartit antara DJP-DJPB-Pemda	Peringkat 2	Provinsi	DJP Prov. Riau Kemenkeu RI

**Gambar 5**  
**Prestasi dan Penghargaan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023**



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 merupakan Laporan yang menyajikan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Laporan ini memuat pokok-pokok dari Rencana Prioritas Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara-cara pencapaian tujuan dan pengukuran akuntabilitas kinerja Bapenda Tahun 2023 yang sudah ditetapkan. Dimana penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kota Dumai merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah melaksanakan 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan yang mana 1 (satu) Program merupakan program prioritas yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sedangkan 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yaitu : “Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) “terrealisasi sebesar 63,41% dari target sebesar 52% dengan tingkat capaian sebesar 121,94%.
3. Realisasi penyerapan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 35.981.045.374 dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.049.135.188 meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan tingkat capaian sebesar 92,14%.
4. Realisasi kinerja output program/kegiatan/sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.

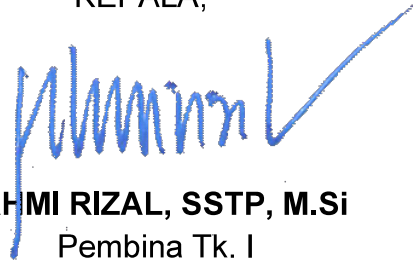


5. Dari seluruh capaian di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 dapat dikategorikan SANGAT TINGGI dari segi capaian IKU dan capaian penyerapan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 ini disusun, dan selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Dumai serta pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Kota Dumai, 10 Januari 2024

KEPALA,



**FAHMI RIZAL, SSTP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19780710 199711 1 001

Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	100 %	19,516,480,269	100 %	31,916,276,276	100 %	33,668,132,866	100 %	34,933,828,109	100 %	36,580,437,284	100 %	166,514,167,804	Badan Pendapatan Daerah		
		5,02,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	76,422,782	15 Dokumen	198,927,300	15 Dokumen	198,430,000	15 Dokumen	208,351,500	15 Dokumen	218,769,075	15 Dokumen	900,900,657	Sekretariat		
		5,02,01,2,01,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	1 Dokumen	13,558,080	2 Dokumen	29,479,500	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	31,500,000	2 Dokumen	33,075,000	2 Dokumen	137,612,580	Sekretariat		
		5,02,01,2,01,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	1 Dokumen	17,424,772	2 Dokumen	24,855,250	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	26,250,000	2 Dokumen	27,562,500	2 Dokumen	121,092,522	Sekretariat		
		5,02,01,2,01,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	1 Dokumen	19,447,200	2 Dokumen	28,094,000	2 Dokumen	28,580,000	2 Dokumen	30,009,000	2 Dokumen	31,509,450	2 Dokumen	137,639,650	Sekretariat		
		5,02,01,2,01,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	-	2 Dokumen	37,164,800	2 Dokumen	14,850,000	2 Dokumen	15,592,500	2 Dokumen	16,372,125	2 Dokumen	46,814,625	Sekretariat		
		5,02,01,2,01,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	n/a	n/a	-	2 Dokumen	29,596,050	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	31,500,000	2 Dokumen	33,075,000	2 Dokumen	124,171,050	Sekretariat		
		5,02,01,2,01,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	1 Dokumen	20,124,430	4 Laporan	34,933,500	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	42,000,000	4 Laporan	44,100,000	4 Laporan	181,157,930	Sekretariat		
		5,02,01,2,01,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	1 Dokumen	5,868,300	1 Laporan	14,804,200	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	31,500,000	1 Laporan	33,075,000	1 Laporan	115,247,500	Sekretariat		
		5,02,01,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	15,100,289,827	3 Dokumen	21,595,106,443	3 Dokumen	26,061,103,886	3 Dokumen	27,364,158,080	3 Dokumen	28,732,367,034	3 Dokumen	118,853,028,271	Sekretariat		
		5,02,01,2,02,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	14 Bulan	15,093,289,827	74 Orang/Bulan	21,550,172,443	74 Orang/Bulan	26,016,169,886	74 Orang/Bulan	27,316,978,380	74 Orang/Bulan	28,682,827,299	74 Orang/Bulan	118,659,437,836	Sekretariat		
		5,02,01,2,02,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	1 Laporan	7,000,000	2 Laporan	29,934,000	2 Laporan	29,934,000	2 Laporan	31,430,700	2 Laporan	33,002,235	2 Laporan	131,300,935	Sekretariat		
		5,02,01,2,02,8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	n/a	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,750,000	1 Dokumen	16,537,500	1 Dokumen	62,287,500	Sekretariat		
		5,02,01,2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	35,779,000	2 Laporan	49,608,800	2 Laporan	54,569,680	2 Laporan	57,298,164	2 Laporan	60,163,072	2 Laporan	221,639,716	Sekretariat		
		5,02,01,2,03,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	1 Dokumen	35,779,000	2 Laporan	49,608,800	2 Laporan	54,569,680	2 Laporan	57,298,164	2 Laporan	60,163,072	2 Laporan	221,639,716	Sekretariat		
		5,02,01,2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	384,904,000	3 Laporan	1,121,537,569	3 Laporan	1,148,000,000	3 Laporan	987,500,000	3 Laporan	1,047,375,000	3 Laporan	4,315,412,569	Sekretariat		
		5,02,01,2,05,1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n/a	12 Bulan	64,540,000	2 Unit	22,600,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	52,500,000	2 Unit	55,125,000	2 Unit	244,765,000	Sekretariat		
		5,02,01,2,05,2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	1 Paket	31,250,000	1 Paket	198,384,569	n/a	199,000,000	n/a	-	1 Paket	-	1 Paket	229,634,569	Sekretariat		
		5,02,01,2,05,9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	12 Bulan	289,114,000	75 Orang	900,553,000	75 Orang	900,000,000	75 Orang	945,000,000	75 Orang	992,250,000	75 Orang	4,026,917,000	Sekretariat		
		5,02,01,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1,187,345,178	154 Dokumen	1,418,284,500	154 Dokumen	1,560,783,950	154 Dokumen	1,638,823,148	154 Dokumen	1,720,764,205	154 Dokumen	6,339,265,802	Sekretariat		
		5,02,01,2,06,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	16,564,400	1 Paket	69,597,000	1 Paket	76,556,700	1 Paket	80,384,535	1 Paket	84,403,762	1 Paket	310,941,997	Sekretariat		
		5,02,01,2,06,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	216,967,649	2 Paket	326,086,500	2 Paket	358,695,150	2 Paket	376,629,908	2 Paket	395,461,403	2 Paket	1,456,872,960	Sekretariat		
		5,02,01,2,06,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	125,202,800	3 Paket	86,087,000	3 Paket	94,695,700	3 Paket	99,430,485	3 Paket	104,402,009	3 Paket	384,615,194	Sekretariat		
		5,02,01,2,06,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	12 Bulan	174,973,050	2 Paket	170,808,000	2 Paket	187,888,800	2 Paket	197,283,240	2 Paket	207,147,402	2 Paket	763,127,442	Sekretariat		
		5,02,01,2,06,6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	n/a	12 Bulan	18,300,000	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	26,400,000	4 Dokumen	27,720,000	4 Dokumen	29,106,000	4 Dokumen	107,226,000	Sekretariat		
		5,02,01,2,06,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	12 Bulan	635,337,279	150 Laporan	742,316,000	150 Laporan	816,547,600	150 Laporan	857,374,980	150 Laporan	900,243,729	150 Laporan	3,316,482,309	Sekretariat		
		5,02,01,2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	539,322,600	31 Unit	903,621,764	27 Unit	886,208,000	28 Unit	606,208,000	28 Unit	632,368,000	137 Unit	2,828,396,764	Sekretariat		
		5,02,01,2,07,2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 Unit	125,206,000	1 Unit	125,206,000	1 Unit	125,206,000	1 Unit	125,206,000	1 Unit	500,832,000	Sekretariat		
		5,02,01,2,07,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	12 Bulan	126,179,300	12 Unit	250,627,200	10 Unit	200,000,000	10 Unit	210,000,000	10 Unit	220,500,000	54 Unit	881,127,200	Sekretariat		
		5,02,01,2,07,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	12 Bulan	413,143,300	16 Unit	433,037,700	16 Unit	260,000,000	16 Unit	273,000,000	16 Unit	286,650,000	79 Unit	1,252,687,700	Sekretariat		
		5,02,01,2,07,9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 Unit	94,746,864	1 Unit	100,000,000	n/a	-	n/a	-	1 Unit	194,746,864	Sekretariat		
		5,02,01,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,327,843,769	11 Laporan	2,493,342,000	11 Laporan	2,564,245,350	11 Laporan	2,689,467,618	11 Laporan	2,730,107,618	11 Laporan	10,467,152,585	Sekretariat		
		5,02,01,2,08,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	12 Bulan	3,980,000	2 Laporan	4,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,500,000	2 Laporan	11,025,000	2 Laporan	35,525,000	Sekretariat		
		5,02,01,2,08,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12 Bulan	425,858,069	4 Laporan	443,339,000	4 Laporan	450,000,000	4 Laporan	472,500,000	4 Laporan	496,125,000	4 Laporan	1,861,964,000	Sekretariat		
		5,02,01,2,08,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	14,400,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	181,500,000	1 Laporan	646,500,000	Sekretariat		
		5,02,01,2,08,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	883,605,700	4 Laporan	1,896,003,000	4 Laporan	1,944,245,350	4 Laporan	2,041,457,618	4 Laporan	2,041,457,618	4 Laporan	7,923,163,585	Sekretariat		
		5,02,01,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	863,673,113	167 Unit	4,136,239,800	167 Unit	1,304,792,000	167 Unit	1,370,031,600	167 Unit	1,438,533,180	167 Unit	6,248,596,680	Sekretariat		
		5,02,01,2,09,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznainya	n/a	12 Bulan	322,052,680	9 Unit	316,412,800	9 Unit	344,792,000	9 Unit	362,031,600	9 Unit	380,133,180	9 Unit	1,403,369,580	Sekretariat		
		5,02,01,2,09,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	12 Bulan	179,424,343	156 Unit	157,234,800	156 Unit	160,000,000	156 Unit	168,000,000	156 Unit	176,400,000	156 Unit	661,634,800	Sekretariat		
		5,02,01,2,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	3 Unit	188,219,000	1 Unit	2,304,254,300	1 Unit	400,000,000	1 Unit	420,000,000	1 Unit	441,000,000	1 Unit	3,565,254,300	Sekretariat		
		5,02,01,2,09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	2 Unit	173,877,190	1 Unit	1,357,338,000	1 Unit	400,000,000	1 Unit	420,000,000	1 Unit	441,000,000	1 Unit	2,618,338,000	Sekretariat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	100%	4,989,961,918	100%	7,132,856,912	100%	6,708,044,688	100%	7,021,500,823	100%	7,396,097,853	100%	33,248,451,984	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100%	100%	4,989,961,918	100%	7,132,856,912	100%	6,708,044,688	100%	7,021,500,823	100%	7,396,097,853	100%	33,248,451,984	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	n/a	2 Dokumen / 4 Laporan	250,104,128	1 Dokumen	86,935,780	1 Dokumen	95,629,358	1 Dokumen	100,410,826	1 Dokumen	105,431,367	1 Dokumen	638,511,459	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	1 Dokumen	76,872,980	1 Dokumen	231,762,860	1 Dokumen	254,939,146	1 Dokumen	267,686,103	1 Dokumen	281,070,408	1 Dokumen	1,112,331,498	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	9 Penda / Perwa	295,466,769	1 Laporan	825,324,632	1 Laporan	866,590,864	1 Laporan	866,590,864	1 Laporan	909,920,407	1 Laporan	3,763,893,535	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	n/a	12 Bulan	1,624,062,884	1 Unit	2,050,769,440	1 Unit	1,200,000,000	1 Unit	1,260,000,000	1 Unit	1,323,000,000	1 Unit	7,457,832,324	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	n/a	3000 WP	245,976,634	10 Laporan	488,132,900	10 Laporan	538,046,190	10 Laporan	564,948,500	10 Laporan	593,195,924	10 Laporan	2,431,300,148	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	n/a	90%	779,235,066	1 Laporan	528,409,200	1 Laporan	581,250,120	1 Laporan	610,312,626	1 Laporan	640,828,257	1 Laporan	3,140,035,269	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	n/a	150 WP / 10 WP	344,413,951	10 Obyek Pajak	382,986,400	10 Obyek Pajak	421,285,040	10 Obyek Pajak	442,349,292	10 Obyek Pajak	464,466,757	10 Obyek Pajak	2,055,501,440	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	n/a	9 OP	167,711,364	1 Dokumen	150,554,100	1 Dokumen	165,609,510	1 Dokumen	173,889,986	1 Dokumen	182,584,485	1 Dokumen	840,349,444	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	n/a	1 Dokumen	480,640,891	1000 Layanan	819,706,000	1000 Layanan	860,691,300	1000 Layanan	903,725,865	1000 Layanan	948,912,158	1000 Layanan	4,013,676,214	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	n/a	4 Kali	76,025,603	1 Dokumen	114,999,200	1 Dokumen	126,499,120	1 Dokumen	132,624,076	1 Dokumen	139,465,280	1 Dokumen	589,813,279	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	n/a	25 WP / 400 STPD	406,772,228	1 Dokumen	662,395,000	1 Dokumen	728,634,500	1 Dokumen	765,066,225	1 Dokumen	803,319,536	1 Dokumen	3,366,187,489	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	n/a	35 Berkas	94,988,323	1 Dokumen	151,091,500	1 Dokumen	166,200,650	1 Dokumen	174,510,683	1 Dokumen	183,236,217	1 Dokumen	770,027,372	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah	n/a	4 Kali	147,681,097	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	288,750,000	1 Dokumen	303,187,500	1 Dokumen	1,264,616,597	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	n/a	n/a	-	1 Laporan	388,789,900	2 Laporan	427,668,890	2 Laporan	470,435,779	2 Laporan	517,479,357	2 Laporan	1,804,373,926	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	367,500,000	1 Laporan	385,875,000	1 Laporan	1,103,375,000	Badan Pendapatan Daerah	
			JUMLAH				24,505,432,187		39,049,135,188		40,276,177,554		41,956,329,933		43,976,534,937		165,267,177,812		

## Matriks Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2			KEUANGAN												28,657,827,008	39,049,135,188
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												25,029,144,486	31,916,278,276
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												198,927,300	198,927,300
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokum en	15 Dokumen	29,479,500	29,479,500
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokum en	15 Dokumen	24,855,250	24,855,250
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokum en	15 Dokumen	28,094,000	28,094,000
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokum en	15 Dokumen	37,164,800	37,164,800
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokum en	15 Dokumen	29,596,050	29,596,050
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	15 Dokum en	15 Dokumen	34,933,500	34,933,500
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	15 Dokum en	15 Dokumen	14,804,200	14,804,200
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												19,566,391,155	21,595,106,443

5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	69 Orang/bulan	74 Orang/bulan	2 Laporan	2 Laporan	19,521,457,155	21,550,172,443
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29,934,000	29,934,000
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000
5	2	1	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>												<b>49,608,800</b>	<b>49,608,800</b>
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	49,608,800	49,608,800
5	2	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												<b>219,665,000</b>	<b>1,121,537,569</b>
5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	22,600,000	22,600,000
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	3 Laporan	3 Laporan	48,865,000	198,384,569
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	75 Orang	75 Orang	3 Laporan	3 Laporan	148,200,000	900,553,000
5	2	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												<b>1,269,218,894</b>	<b>1,418,894,500</b>
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	154 Dokumen	154 Dokumen	59,597,000	69,597,000
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	154 Dokumen	154 Dokumen	326,086,500	326,086,500
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	154 Dokumen	154 Dokumen	71,087,000	86,087,000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	154 Dokumen	154 Dokumen	170,808,000	170,808,000
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	154 Dokumen	154 Dokumen	24,000,000	24,000,000

5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	150 Laporan	160 Laporan	154 Dokumen	154 Dokumen	617,640,394	742,316,000
5	2	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												<b>622,285,882</b>	<b>903,621,764</b>
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	31 Unit	69 Unit	125,208,000	125,208,000
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	12 Unit	30 Unit	31 Unit	69 Unit	150,627,200	250,627,200
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	100 %	100 %	16 Unit	37 Unit	31 Unit	69 Unit	251,701,818	433,037,700
5	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	31 Unit	69 Unit	94,748,864	94,748,864
5	2	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>1,853,807,555</b>	<b>2,493,342,000</b>
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	4,000,000	4,000,000

5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	418,339,000	443,339,000
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	150,000,000	150,000,000
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	1,281,468,555	1,896,003,000
5	2	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>1,249,239,900</b>	<b>4,135,239,900</b>
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	167 Unit	167 Unit	316,412,800	316,412,800
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	156 Unit	156 Unit	167 Unit	167 Unit	157,234,800	157,234,800
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	167 Unit	167 Unit	382,004,300	2,304,254,300
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	167 Unit	167 Unit	393,588,000	1,357,338,000
5	2	4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>												<b>3,628,682,522</b>	<b>7,132,856,912</b>
5	2	4	2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>												<b>3,628,682,522</b>	<b>7,132,856,912</b>
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	86,935,780	86,935,780
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	131,762,860	231,762,860

5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	242,384,682	825,324,632
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	413,004,500	2,050,769,440
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	241,057,300	489,132,900
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	384,809,200	528,409,200
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	10 Obyek Pajak	10 Obyek Pajak	100 %	100 %	382,986,400	382,986,400
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	150,554,100	150,554,100
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1000 Layanan	1000 Layanan	100 %	100 %	495,443,000	819,706,000
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	114,999,200	114,999,200
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	385,115,000	662,395,000
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	101,091,500	151,091,500
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	200,000,000	250,000,000
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	298,539,000	388,789,900
TOTAL																28,657,827,008	39,049,135,188





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

**Pihak Kedua,**



**H. PAISAL, SKM, MARS**

**Pihak Pertama,**



**FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI**  
NIP. 19780710 199711 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	%	52

**1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

**Rp. 3.628.682.522**

Dumai, Januari 2023

**WALI KOTA DUMAI,**  
  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

**KEPALA,**  
  
**FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI**  
NIP. 19780710 199711 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**  
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**  
J a b a t a n : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

  
PIHAK KEDUA  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

  
PIHAK PERTAMA  
**FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**  
Pembina Tk I  
NIP. 19780710 199711 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023**

**UNIT KERJA : KEPALA BADAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	31
2.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	52

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.916.278.276
2.		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.132.856.912
JUMLAH			39.049.135.188

Dumai, 25 September 2023

  
 PIHAK KEDUA  
**H. PAISAL, SKM, MARS**


  
 PIHAK PERTAMA  
**FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI**  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19780710 199711 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN 2022-2026**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51	52	53	54	54

Sumber: Renstra 2022 - 2026 Perangkat Daerah

 **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA DUMAI** 

  
**FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si**  
 NIP. 19780710 199711 1 001

**EVALUASI BERKALA RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2023 BERKALA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Target / Realisasi												Realisasi Tahunan 2023	Persen
					Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4				
					Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen		
(1)	(2)		(3)	2023	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	52	13			26			39			52				
						9,36	72,01		47,09	181,1		39,28	100,73		63,41	121,94		

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA DUMAI**

**FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si**  
NIP. 19780710 199711 1 001

## LAMPIRAN 3 : PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN, PENDUKUNG DAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN

URUSAN PEMERINTAHAN

: PENUNJANG URUSAN BIDANG KEUANGAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

: BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

KEBIJAKAN STRATEGIS		URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET FISIK	REALISASI FISIK	SATUAN TARGET DAN REALISASI FISIK	CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020	I	Belanja Operasi					36.044.266.824	33.290.589.274	92,36	%
		II	Belanja Modal					3.004.868.364	2.690.456.100	89,54	%
		III	Belanja Tidak Terduga					-	-	-	%
2	Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang Ditetapkan Sebelum Tanggal 1 Januari 2022	IV	Belanja Transfer					-	-	-	%
		Jumlah						39.049.135.188	35.981.045.374	92,14	%
		1	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	%	100	31.916.278.276	29.361.339.971	91,99	%
		Indikator Program: Persentase penunjang urusan pemerintah									
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	15	15	Dokumen	100	198.927.300	195.195.453	98,12	%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen	100	29.479.500	29.440.300	99,87	%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	Dokumen	100	24.855.250	24.364.333	98,02	%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	Dokumen	100	28.094.000	27.852.020	99,14	%
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	Dokumen	100	37.164.800	36.248.850	97,54	%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	2	Dokumen	100	29.596.050	28.645.000	96,79	%
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Laporan	100	34.933.500	34.502.450	98,77	%
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Laporan	100	14.804.200	14.142.500	95,53	%
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	Dokumen	100	21.595.106.443	19.598.244.242	90,83	%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74	74	Bulan	100	21.550.172.443	19.561.697.642	90,85	%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2	2	Laporan	100	29.934.000	25.020.350	83,59	%
		3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	Dokumen	100	15.000.000	11.526.250	76,84	%
		3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2	2	Dokumen	100	49.608.800	45.554.700	91,83	%
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Dokumen	100	49.608.800	45.554.700	91,83	%
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	3	Laporan	100	1.121.537.569	1.109.800.087	98,95	%
		1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	Unit	100	22.600.000	22.600.000	100,00	%
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	Paket	100	198.384.569	187.500.000	94,51	%
		3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82	82	Orang	100	900.553.000	899.700.087	99,91	%
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154	154	Dokumen	100	1.418.894.500	1.399.902.870	98,66	%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	Paket	100	69.597.000	59.457.600	85,43	%
		2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	2	Paket	100	326.086.500	325.825.000	99,92	%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3	Paket	100	86.087.000	84.876.000	98,59	%
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	Paket	100	170.808.000	170.140.000	99,61	%
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4	4	Dokumen	100	24.000.000	17.640.000	73,50	%
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	160	Laporan	100	742.316.000	741.964.270	99,95	%
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	69	69	Unit	100	903.621.764	708.991.000	78,46	%
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	Unit	100	125.208.000	125.160.000	99,96	%
		2	Pengadaan Mebel	30	30	Unit	100	250.627.200	197.699.000	78,88	%
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37	37	Unit	100	433.037.700	351.869.000	81,26	%
		4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	100	94.748.864	34.263.000	36,16	%
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	11	11	Laporan	100	2.493.342.000	2.400.104.360	96,26	%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	Laporan	100	4.000.000	4.000.000	100,00	%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	Laporan	100	443.339.000	422.490.603	95,30	%
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Laporan	100	150.000.000	114.452.195	76,30	%
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4	Laporan	100	1.896.003.000	1.859.161.562	98,06	%
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	167	167	Unit	100	4.135.239.900	3.903.547.259	94,40	%

			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	9	Unit	100	316.412.800	309.192.687	97,72	%
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156	156	Unit	100	157.234.800	156.900.387	99,79	%
			3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	100	2.304.254.300	2.252.776.371	97,77	%
			4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	100	1.357.338.000	1.184.677.814	87,28	%
		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	100	%	100	7.132.856.912	6.619.705.403	92,88	%
			Indikator Program: Persentase pencapaian Target Pendapatan									
			1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	100	%	100	7.132.856.912	6.619.705.403	92,81	%
			1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1	1	Dokumen	100	86.935.780	76.191.936	87,64	%
			2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1	1	Dokumen	100	231.762.860	194.915.795	84,10	%
			3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	Laporan	100	825.324.632	793.399.417	96,13	%
			4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	Unit	100	2.050.769.440	1.946.498.419	94,92	%
			5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10	10	Laporan	100	489.132.900	429.436.485	87,80	%
			6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	1	Laporan	100	528.409.200	505.398.034	95,65	%
			7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10	10	Obyek Pajak	100	382.986.400	343.446.219	89,68	%
			8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	10	10	Dokumen	100	150.554.100	117.670.071	78,16	%
			9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2000	2000	Layanan	100	819.706.000	767.712.028	93,66	%
			10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	114.999.200	106.038.748	92,21	%
			11	Penagihan Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	662.395.000	591.746.222	89,33	%
			12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	151.091.500	145.755.365	96,47	%
			13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	250.000.000	240.464.398	96,19	%
			14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	1	Laporan	100	388.789.900	361.032.266	92,86	%





djp

#PajakKuat  
IndonesiaMaju

## Sertifikat Penghargaan



diberikan kepada:

# Pemerintah Daerah Kota Dumai

**Peringkat 2**

**Atas Kuantitas Data dan Kecepatan Penyampaian Data kepada DJP**  
dalam Rangka Pelaksanaan PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah  
di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2023.

Pekanbaru, 21 November 2023

Ahmad Djamhari  
Kepala Kanwil DJP Riau

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)